

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)

Ika Novita Ardelia

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Muhadi Setiabudi
ikanovitaa2000@gmail.com

Hilda Kumala Wulandari

Dosen FEB Universitas Muhadi Setiabudi
hilda060791@gmail.com

Yenny Ernitawati

Dosen FEB Universitas Muhadi Setiabudi
yennyernitawati@gmail.com

Dumadi

Dosen FEB Universitas Muhadi Setiabudi
dumadi_adi@yahoo.com.id

Article History:

Received: 31 Agustus 2022

Revised: 05 September 2022

Accepted: 07 September 2022

DOI: 10.29303/jaa.v7i1.165

Abstract. *Since the enactment of the law on regional autonomy, every local government is required to manage finances. Every year, transparency and responsibility are paramount. Good financial management is proven to greatly affect the financial performance of a region. Therefore, this study examines and analyzes the impact of financial performance on local revenues, capital expenditures, and balancing funds. This is done through an empirical approach with secondary data collected from the City and Regency of the former Pekalongan Residency for the 2016-2020 period in the form of the APBD realization financial report used as a secondary data sample in this study using the saturated sampling method. The results of this study indicate that the first local revenue has an effect on the financial performance of local governments. Second, this study reveals that capital expenditure does not have a significant*

impact on the financial performance of local governments. Third, balancing funds have a significant effect on the financial performance of local governments. Finally, it was found that the simultaneous influence of regional original income, capital expenditure, and balancing funds was significant on the financial performance of local governments.

Abstrak: Sejak ditetapkan undang-undang mengenai otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola keuangan. Setiap tahun, transparansi dan tanggung jawab merupakan hal yang terpenting. Pengelolaan keuangan yang baik terbukti sangat mempengaruhi kinerja keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, Penelitian ini mengkaji serta menganalisis dampak kinerja keuangan dari pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan empiris dengan data sekunder yang dikumpulkan dari Kota dan Kabupaten Eks Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020 berupa Laporan keuangan realisasi APBD digunakan sebagai sampel data sekunder dalam penelitian ini dengan digunakan metode pengambilan sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, studi ini mengungkapkan bahwa belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terakhir, ditemukan pengaruh secara simultan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keyword : *Regional Original Income, Capital Expenditure, Balancing Fund, Regional Government Financial Performance*

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Setelah tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar-besaran kemudian menetapkan otonomi daerah. Versi terbaru dari aturan pemerintah tentang otonomi daerah adalah dapat dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk wilayahnya dapat diatur sendiri sesuai kewenangan yang diberikan. Selain itu, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki praktik akuntansi dan akuntabilitas yang transparan kepada daerah. Undang-Undang Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 3 menegaskan bahwasannya setiap keuangan daerah wajib dilakukan secara terbuka, tertib, bertanggung jawab, dan patuh hukum, dan ekonomis dengan mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan, kepentingan umum, kesetaraan dan pemerataan.

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan otonomi sebagai akibat dari ketidakmampuannya mengawasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam rangka menghasilkan pertumbuhan daerah yang sejalan dengan anggaran daerah, perbaikan proses pembangunan ekonomi berdampak setelah diterapkannya kebijakan otonomi dan membuat pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai. Daerah sendiri bertanggung jawab atas kewenangan daerah dalam pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat menjadi kenyataan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.

Pengelolaan keuangan suatu daerah dianggap sebagai komponen penting dari setiap negara berkembang. Pelaksanaannya menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan kinerja yang optimal menunjukkan keberhasilan pembangunan. Hal ini juga dapat menunjukkan independensi keuangan daerah dari pemerintah pusat dapat meningkatkan potensi peningkatan kinerja keuangan. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi tertentu seperti yang ditetapkan oleh SAP saat melakukan pengelolaan keuangan. Kinerja keuangan yang baik ditunjukkan oleh kemampuan suatu daerah atau bangsa dalam mengelola keuangannya dengan baik. Kinerja keuangan menjadi faktor terpenting dalam menunjukkan keefektifan serta keefisienan suatu kegiatan guna mencapai tujuannya (Izzati et al. 2021). Jika suatu pemerintah atau daerah mengelola keuangannya dengan baik, maka kinerja keuangan yang baik terindikasi. Namun, kinerja keuangan yang kurang baik dapat diindikasikan jika keuangan dikelola dengan tidak benar. Hal ini dapat menyebabkan daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang kurang baik atau bahkan menurun. Karena kinerja mengukur kesuksesan, penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan mereka (Khasanah et al. 2021).

Berbagai penelitian tentang variabel yang berbeda seperti hukum independen, kondisi ekonomi, dan hubungan antar pemerintah menentukan kinerja pemerintah daerah. Penulis pada penelitian ini memfokuskan pada

tiga variabel yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang pertama adalah variabel pendapatan asli daerah yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang kedua adalah belanja modal, dan yang ketiga adalah dana perimbangan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sistem otonomi diterapkan dalam mensukseskan pemerintah daerah di Indonesia. Sistem ini menggunakan tiga karakteristik yang melekat: proses, komponen dan tujuan. Karakteristik ini disinergikan untuk mencapai satu tujuan yang disebut sebagai komponen (Maftuhin et al. 2021). Salah satu pernyataan Digidowiseiso et al. (2021) yang menyatakan pendapatan daerah sebagai pendapatan yang diperoleh dari menggali pembangunan melalui potensi daerah. Pendapatan ini dikelola oleh pemerintah daerah dan tunduk pada peraturan yang berlaku. Perbandingan realisasi dengan tujuan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat efektivitas keuangan suatu daerah. Jika pendapatan daerah terealisasi melebihi tujuan, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianggap efektif. Tergantung pada kemampuan daerah untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumber uang, pertumbuhan pendapatan asli daerah tumbuh atau menurun (Sari & Mustanda 2019).

Selain itu, belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik diatur oleh Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 juga dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan belanja modal mencakup pembelian aset dengan lebih dari periode akuntansi disebut sebagai belanja modal modal. Pemerintah dapat mengalokasikan dana yang diperlukan agar banyak pihak dapat merasakan dampaknya. Dengan melakukan penanaman modal, pemerintah daerah dapat menarik investor dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja baru. Pengembangan lapangan kerja baru diharapkan dapat mendorong produktivitas lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah (Dwigantara & Handayani 2020)

Wahyudin (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan tersebut menyediakan tambahan dana untuk menghilangkan kesenjangan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pembiayaan. Juga menyediakan dana untuk kebutuhan masyarakat dan infrastruktur daerah, dengan alokasi maksimal untuk keduanya. Dana transfer pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah yang baik berasal dari transfer dana yang digunakan untuk pelayanan publik. Namun, hal ini menyebabkan persentase yang menurun ketika masyarakat menjadi tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya.

Penelitian yang meliputi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemda merupakan topik yang menarik untuk diteliti, karena segala hal yang berkaitan dengan faktor keuangan merupakan hal yang dinilai sensitif untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang diteliti Digdowiseiso et al. (2021) terdapat beberapa perbedaan diantaranya: hasil penelitian Digdowiseiso ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh signifikan dan perbedaan lainnya pengukuran variabel kinerja keuangan oleh Digdowiseiso menggunakan satu rasio yaitu rasio desentralisasi. Sedangkan peneliti menggunakan perhitungan variabel kinerja keuangan dengan tiga rasio perhitungan diantaranya rasio kemandirian, ketergantungan dan desentralisasi.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Prastiwi & Aji (2020) menemukan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Artinya pendapatan daerah yang tinggi akan menghasilkan peningkatan pelayanan publik karena dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah dijalankan, membuat daerah independen dari pembayaran dari pemerintah pusat. Hal ini juga akan mempengaruhi proporsi kemandirian daerah yang sangat baik, yang akan mempengaruhi kinerja keuangan meningkat. Namun, Febrianto & Trisnawati (2018) membahas dalam penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan.

Selain pendapatan asli daerah, belanja modal juga mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Anggraeni (2020) menyatakan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah positif dan signifikan. Artinya, belanja modal yang dianggarkan berada pada jalurnya atau dapat digunakan secara maksimal dengan berbagai keuntungan yang nilainya dapat meningkatkan pendapatan daerah maka dengan demikian dapat meningkatkan posisi keuangan pemerintah daerah. Namun tidak dengan Prastiwi & Aji (2020) yang menyimpulkan tidak demikian.

Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh dana perimbangan menurut Maulina et al. (2021) dan pengaruhnya signifikan. Artinya, pemanfaatan dana tambahan dari pemerintah pusat yang dikhususkan untuk keperluan daerah apabila berada pada tujuan awal maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan dampak baik pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun Riset Nauw & Riharjo (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat ketidak konsistenan terhadap hasil penelitian, yang menyebabkan hasil yang berbeda dalam studi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang tersebut, yang ingin dilakukan oleh peneliti ini. Penelitian ini bertujuan

menguji dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial dan simultan dalam hal pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan mengkaji dua pihak dengan akses informasi yang berbeda. Satu pihak, prinsipal, mendelegasikan wewenang kepada pihak lain, agen (Dewata et al. 2021). Menurut Putri & Amanah (2020) dalam beberapa kasus, agen atau pejabat pemerintah terlibat dalam penipuan atau korupsi karena perbedaan informasi mereka. Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen memiliki akses langsung ke informasi yang berbeda. Untuk mengurangi potensi penipuan dan korupsi, percaya bahwa akuntabilitas harus didistribusikan di berbagai daerah. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dengan menerapkan *checks and balances* di setiap daerah. Teori keagenan mengklaim bahwa pemerintah daerah sadar akan kepentingan masyarakatnya sebagai agen. Namun, diyakini bahwa masyarakat tidak mungkin percaya bahwa pemerintah daerah bekerja untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Dengan berkurangnya asimetri informasi berkat umpan balik warga, diyakini akuntabilitas antara daerah dan pemerintah daerah akan seimbang.

Teori agensi percaya bahwa bagi pemerintah daerah atau agen untuk bertindak atas nama masyarakat atau prinsipal. Agen dianggap dapat dipercaya karena mereka menyadari tugas yang diberikan kepada mereka untuk diselesaikan dan percaya bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Dalam teori keagenan, agen bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dapat meningkatkan potensi pendapatan bagi prinsipal. Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang unggul dapat diberikan oleh pemerintah daerah berkat tambahan sumber daya yang disediakan oleh kabupaten khusus (Aulia & Rahmawaty 2020).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa diperlukan Pengelolaan finansial daerah yang bagus memerlukan proses pengelolaan yang berkesinambungan dan dijalankan dengan baik. Hal ini karena proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian keuangan daerah dianggap satu kesatuan (Maulina et al. 2021). Kinerja badan pemerintahan daerah berkaitan dengan kinerja pengelola keuangannya (Wahyudin 2020). Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pernyataan yang dibuat oleh (Dewata et al. 2021). Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan penilaian output keuangan atau kinerja keuangan melalui parameter keuangan selama jangka waktu

tertentu. Kinerja ini dimaksudkan untuk memaknai keberhasilan suatu pencapaian keuangan dan mendukung adanya standar yang tinggi bagi pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

UU No.1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah termasuk pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh sumber yang berwenang. Istilah ini mengacu pada peningkatan pendapatan karena biaya ini. Pendapatan daerah yang diperoleh dari memaksimalkan arus kas daerah dan mendukung inisiatif peningkatan pelayanan publik di pemerintah daerah (Andjarwati et al. 2021). Saputri & Kurnia (2020) mencatat pada tahun 2020 bahwa uang yang dikumpulkan melalui pajak dan retribusi daerah disebut sebagai pendapatan asli daerah. Ini memiliki korelasi langsung dengan pembiayaan kegiatan daerah dan pajak terkait. Selain itu, Prastiwi & Aji (2020) menyatakan pada tahun 2020 bahwa Pendapatan asli suatu daerah adalah sejumlah uang yang berasal dari perekonomian aslinya.

Belanja Modal

Digdowiseiso et al. (2021) menyimpulkan bahwasanya belanja modal ialah kegiatan belanja produktif yang diukur dari bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggarannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Alokasi modal yang semakin besar dalam persentase dapat menjadi tanda bahwa pemerintah daerah efektif dalam mendorong pertumbuhan daerah. Wahyudin (2020) menyatakan bahwa belanja modal adalah aset tetap yang diperoleh atau diperoleh pemerintah melalui pengeluaran dari suatu anggaran. Hal ini dapat menunjukkan produktivitas suatu daerah dalam hal pembangunan. Selain itu, Digdowiseiso et al. (2021) disebutkan bahwa belanja modal dinilai dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Istilah ini biasanya digunakan ketika mengacu pada peningkatan alokasi anggaran dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah tumbuh ketika pengeluaran pemerintah dianggap sebagai pengeluaran modal ini karena pengeluaran modal dianggap sebagai pengeluaran pemerintah. APBD membagi belanja daerah menjadi kategori langsung dan tidak langsung. Pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk membeli aset jangka panjang seperti bangunan, tanah, peralatan dan barang tidak berwujud. Ini termasuk dalam definisi istilah (Maulina et al. 2021).

Dana Perimbangan

Menurut Andaresta & Aswar (2021), pembiayaan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan peningkatan kesejahteraan disebut sebagai dana perimbangan. Pendanaan ini berasal dari sumber-sumber yang terkait dengan pemerintah pusat, seperti dana daerah yang dialokasikan oleh APBN. Pratiwi (2018) dana perimbangan dapat diperoleh melalui APBN. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai upaya

desentralisasi dengan menyeimbangkan anggaran antara pemerintah daerah yang berbeda. Pemerintah pusat mendistribusikan dana ke badan pemerintahan lokal masing-masing daerah. Ini digunakan untuk pekerjaan umum masing-masing daerah serta ekonominya. Uang itu dibagi sesuai dengan potensi pendapatan masing-masing daerah. Ini membantu menyeimbangkan keuangan masing-masing daerah (Maulina et al. 2021). Dana perimbangan menyumbang sebagian besar dana APBD berasal dari sumber pendapatan daerah. Dengan menggunakan peraturan daerah, kenaikan kinerja keuangan dapat datang dari pemerintah daerah berdasarkan pada baiknya pengelolaan keuangan (Nugraha & Trisnawati 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Digdowiseiso et al. (2021) Potensi sumber pendapatan juga dikenal sebagai pendapatan asli daerah sangat penting untuk pembangunan di wilayah tertentu. Tingkat kesuksesan daerah yaitu apabila semakin besar kontribusi daerah yang dihasilkan dari potensi yang ada pada daerah sendiri memiliki dampak pada kenaikan pendapatan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dapat diandalkan dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan hubungan antara pendapatan asli daerah dan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen mengelola keuangannya yang bersumber dari masyarakat atau prinsipal untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang akan membantu mereka mencapai tujuan organisasinya. Masyarakat dapat melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang dapat mengelola keuangannya secara efektif dapat mencapai tujuan organisasinya. Sebab, pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan asli daerah tinggi dan pasti enggan mengandalkan dana dari APBD dikarenakan minimnya tingkat ketergantungan untuk mendanai semua kegiatan operasionalnya sehingga akan meningkatkan status keuangannya dan menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin bagus (Dwigantara & Handayani 2020).

Prastiwi & Aji (2020) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Digdowiseiso et al. (2021) melaporkan pengaruh yang sama dua tahun kemudian pada tahun 2021. Dugaan penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₁: Pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Anggraeni (2020), Pengeluaran modal dimaksudkan untuk membeli aset yang bertahan lebih dari satu tahun. Aset ini dapat berupa bangunan fisik atau utilitas dan infrastruktur lainnya. Keterkaitan teori keagenan dengan belanja modal, pengelolaan aset-aset yang ada, termasuk penggunaan belanja modal yang dianggarkan yang dapat berupa sarana dan prasarana unggulan bagi masyarakat sehingga dapat dirasakan pemerintah daerah perlu mengelola aset-aset tersebut berisiko karena dana yang diperoleh dari manajemen. Agen (pemerintah) yang didelegasikan untuk belanja modal harus bertanggung jawab dan menangani tugas pemeliharaan aset tetap. Maulina et al. (2021) berpendapat bahwa potensi ini harus dimaksimalkan melalui penggunaan yang tepat. Hal ini akan mengarah pada peningkatan layanan publik, yang pada gilirannya akan menghasilkan hasil kinerja keuangan yang unggul. Semakin besar pengeluaran yang diperoleh dari belanja modal untuk pembangunan yang nilai manfaatnya berdampak pada penambahan pendapatan daerah, maka akan menjadikan keuangan daerah bagus karena dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian Anggraeni (2020) yang dilakukan pada tahun 2020, belanja modal oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Digdowiseiso et al. (2021) menyimpulkan kesimpulan yang sama pada tahun 2021. Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa belanja modal oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Untuk alasan ini, hipotesis berikut dibentuk sebagai hasil dari penelitian ini:

H₂: Pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sutrisno & Sugiyanto (2020) Dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang terdesentralisasi, diperlukan dana perimbangan untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal ini karena desentralisasi membutuhkan keseimbangan antara pusat dan daerah. Selain itu, dana perimbangan memungkinkan perbedaan vertikal dan horizontal dalam sumber daya keuangan antara daerah dan pusat. Keterkaitan dengan teori keagenan, pemerintah daerah diharuskan bertanggung jawab atas kewenangan tersebut dengan melakukan pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang optimal dan merata. Dalam situasi ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen dan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan dana

yang diterima. Prastiwi & Aji (2020) ketergantungan pemerintah daerah yang lebih besar pada pemerintah federal/pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah akan terlihat pada saldo dana yang lebih besar yang diterima dari pemerintah federal. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah akan menurun.

Menurut Prastiwi & Aji (2020), Perimbangan dana memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah yaitu berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Andaresta & Aswar (2021) menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis berikut dirumuskan dari studi ini:

H₃: Pengaruh negative dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan teknik Pengumpulan data

Penelitian yang menggunakan angka-angka berupa data adalah penelitian kuantitatif. Ini melibatkan mempelajari populasi sampel melalui perhitungan statistik menggunakan peralatan uji. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan sumber-sumber yang ada. Data untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten dari eks Karesidenan Pekalongan. Laporan tersebut diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan alias DJPK di www.djpk.kemenkeu.go.id. Selain itu, penelitian ini didukung oleh berbagai artikel, jurnal dan buku yang ditemukan di internet.

Pengumpulan data melalui nonprobability sampling. Ini adalah metode yang mana data dikumpulkan dari setiap anggota populasi dengan kesempatan yang sama (Sugiyono 2017). Peneliti kemudian dapat menggunakan SPSS versi 25 untuk mengolah data; SPSS juga dikenal sebagai Aplikasi Analisis Data Statistik.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini terdapat dua kota dan lima kabupaten diwakili berdasarkan laporan realisasi APBD. Populasi disurvei menggunakan metode *non-probability sampling*; ini juga dikenal sebagai sampling jenuh. Metode ini memungkinkan setiap anggota populasi untuk disurvei dalam kemungkinan yang sama. Selanjutnya, semua anggota populasi disurvei dalam keseluruhan artinya semua anggota populasi disurvei sekaligus. Hal ini menghasilkan laporan keuangan Karesidenan Pekalongan terkait laporan pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah selama tahun 2016 hingga 2020. Data tersebut berasal dari data tahunan kota dan kabupaten yang dikumpulkan dari Karesidenan Pekalongan periode 2016-2020.



Vol. 7, No. 1, Oktober 2022

Operasional Variabel

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas disebut juga variabel bebas, dan hasil dari variabel tersebut dianggap variabel terikat. Hasil ini dapat diwakili oleh huruf Y. Pratiwi menyebutkan tiga rasio untuk mengukur variabel dependen kinerja keuangan: rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian (Pratiwi 2018). Rumus untuk masing-masing pengukuran ini menggunakan Y sebagai variabel terikat dan adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Sumber : Mahmudi (2016)

- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber : Mahmudi (2016)

- c. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber : Mahmudi (2016)

Variabel Independen

Sugiyono (2017) mengungkapkan istilah variabel bebas mengacu pada variabel penelitian yang mengubah ataupun menyebabkan variabel lain berubah. Variabel ini disebut juga variabel penyebab. Variabel terikat dikatakan disebabkan oleh variabel bebas, yang disebut juga dengan variabel bebas. Penelitian ini menggunakan X1 untuk pendapatan daerah, X2 untuk belanja modal dan X3 untuk dana perimbangan. Sebagai pengukur variabel-variabel tersebut dipergunakan formula rumus berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD}$$

Sumber : Budiana & Rahayu (2021)

Variabel X2 yaitu belanja modal, untuk mengukur variabel belanja modal (X2) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BM} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jala, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Asset Tetap Lainnya}$$

Sumber : Pratiwi (2018)

Sedangkan variabel X3 yaitu dana perimbangan, untuk mengukur variabel dana perimbangan (X3), menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

Sumber : Nauw & Riharjo (2021)

Metode Analisis Data

Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Meneliti bagaimana beberapa variabel dependen berubah ketika terkena variabel independen disebut analisis regresi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan model regresi dengan dua atau lebih variabel bebas. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikaji melalui analisis dana perimbangan, belanja modal, dan pendapatan daerah (Sugiyono 2017). Persamaan untuk model regresi ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kinerja Keuangan
- α : Nilai konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Nilai *coefficients* dari variabel bebas
- X1 : Pendapatan Asli Daerah
- X2 : Belanja Modal
- X3 : Dana Perimbangan
- e : Kesalahan pengganggu

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t (Parsial)

Studi menyimpulkan bahwa tes ini digunakan untuk menentukan apakah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan penelitian yang melibatkan tes (Ghozali 2018). Ini karena ketika menguji signifikansi hasil, ditemukan nilai yang lebih tinggi dari 0,05. Akibatnya, hipotesis ditolak dan disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Koefisien regresi yang signifikan antara variabel dependen dan independen membuktikan bahwa variabel dependen secara parsial dipengaruhi oleh variabel independen. Jika koefisien korelasi memiliki signifikansi di bawah 0,05, maka pengaruh tersebut dianggap signifikan dan hipotesis dapat diterima.

Uji Statistik F (Simultan)

Uji kecocokan yang baik atau uji F dapat dilakukan pada model untuk menentukan kelayakannya. Tes ini mengukur persentase perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen dan menentukan apakah model layak. Pengujian simultan memungkinkan peneliti untuk melihat apakah ada variabel dependen yang dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen. Tingkat signifikansi 0,05 digunakan selama pengujian ini. Menurut Ghozali 2018, nilai F digunakan untuk menentukan apakah suatu model memenuhi kriteria fit. Ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis, seperti yang dinyatakan dalam kriteria berikut:

- 1.) Dengan menggunakan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Jika hal ini terjadi, hipotesis alternatif terbukti dan dapat digunakan untuk menentukan masing-masing variabel terikat dipengaruhi oleh masing-masing variabel bebas dalam persamaan simultan.
- 2.) Dengan menggunakan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 maka hipotesis dapat ditolak. Jika hal ini terjadi, hipotesis alternatif tidak terbukti dan tidak dapat digunakan untuk menentukan masing-masing variabel terikat dipengaruhi oleh masing-masing variabel bebas dalam persamaan simultan.

Pengujian Koefisien Determinasi

Ghozali (2018) menyatakan Koefisien R^2 menunjukkan kesesuaian model regresi. Nilai ini adalah rasio 0 banding 1, dan nilai yang lebih tinggi berarti kecocokan yang lebih baik. Koefisien R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan varians variabel dependen kurang dari yang diharapkan. Saat menguji R^2 , nilai yang lebih tinggi berarti model yang lebih baik. Perubahan variabel dependen dijelaskan oleh perubahan variabel independen. Inilah sebabnya mengapa model dengan nilai R^2 tinggi dianggap paling akurat. Koefisien determinasi mengungkapkan seberapa banyak informasi yang diberikan variabel independen tentang perubahan variabel dependen. Nilai Adjusted R Square digunakan saat menguji lebih dari dua variabel independen. Nilai R square menunjukkan jumlah variabel yang diuji ketika hanya satu atau dua yang diuji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD. Data tersebut berasal dari tahun 2016-2020 dan fokus pada kawasan eks Karesidenan Pekalongan. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini:

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	131,628	4,517		,000
	Pendapatan Asli Daerah	,091	,022	,635	,000
	Belanja Modal	,006	,012	,084	,618
	Dana Perimbangan	-,034	,005	-1,284	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 25 (2022)

Hasil dari Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini tercantum dalam persamaan seperti mode sebagai:

$$Y = 131,628 + 0,091X1 + 0,006X2 + (- 0,034X3) + e$$

Angka konstan dari persamaan tersebut adalah 131.628. Untuk diketahui bahwa Meniadakan belanja modal, pendapatan dan dana perimbangan pemerintah daerah menentukan kinerja keuangannya, perlu melihat nilai kinerja keuangan sebesar 131.628.

Koefisien X1 adalah 0,091. Artinya Pendapatan Asli Daerah atau X1, memiliki arah positif keterkaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika X1 meningkat sebesar 1, kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebanyak 0,091. Sekitar 91% kinerja keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh 91% pendapatan daerahnya. Hubungan ini berlaku bahkan jika X2 dan X3 tidak berubah. Dengan kata lain, sebagian besar kinerja keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh sumber pendapatan yang paling sering digunakan.

Koefisien X2 adalah 0,006. Artinya, belanja modal atau X2 mempunyai arah positive dengan kinerja keuangan. Untuk setiap 1 yang dibelanjakan, kinerja keuangan meningkat sebesar 0,006, selama X1 dan X3 tetap konstan. Selain itu, belanja modal menyumbang 6% dari efek pada kinerja keuangan di antara pemerintah daerah.

Nilai koefisien X3 adalah -0,034. Artinya Variabel Dana Perimbangan mempunyai arah negatif pada kinerja pemerintah daerah setiap kali nilai koefisien berubah. Hubungan ini ditentukan dengan asumsi bahwa X1 dan X2 tetap konstan. Dalam hal ini, setiap kenaikan satu akan menurunkan kinerja sebesar 0,034 atau 34% dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Saat melakukan penelitian, uji-t disebut sebagai uji-t parsial digunakan untuk menentukan seberapa besar pemahaman yang ada tentang pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Hal ini karena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui jika variabel penelitian lolos uji signifikansi. Jika hasil menunjukkan nilai t kurang dari 0,05, maka hipotesis nol diasumsikan itu ditolak (Ghozali 2018).

Tabel 2
Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	131,628	4,517		29,141	,000
	Pendapatan Asli Daerah	,091	,022	,635	4,173	,000
	Belanja Modal	,006	,012	,084	,503	,618
	Dana Perimbangan	-,034	,005	-1,284	-6,527	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 25 (2022)

Pada Tabel 2, Ketiga uji t dilakukan pada variabel yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan. Uji t pertama dilakukan pada variabel pendapatan asli daerah; hipotesis menyatakan ada hubungan positif yang signifikan antara kinerja keuangan dan pendapatan daerah. Berdasarkan nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ini valid. Hasil ini sesuai dengan Digdowiseiso et al. (2021) dan Prastiwi & Aji (2020). Studi tersebut mengklaim bahwa pendapatan daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan antara temuan-temuan ini dijelaskan oleh tingkat kemandirian yang dinikmati setiap daerah dilihat melalui kemampuan Pemda untuk memanfaatkan potensi kekayaan dan sumber daya mereka yang lebih tinggi daripada kebanyakan aliran pendapatan daerah. Selain itu, jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi dapat berdampak positif terhadap posisi keuangan pemerintah daerah. Penggalan potensi kemandirian daerah hanya dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang baik. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dampak positif bagi daerah, salah satunya adalah pendanaan mandiri untuk kegiatan dan kebutuhan daerah. Teori keagenan menegaskan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam daerah. Artinya, pemerintah daerah harus menunjukkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang baik. Sebagai agen (pemerintah), dituntut agar Kebutuhan dan keinginan masyarakat terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan memungut pajak dan retribusi dari masyarakat sesuai dengan tugas pemerintah daerah sebagai agen. Namun hasil ini bertolak belakang oleh Febrianto & Trisnawati (2018) dan Nugraha & Trisnawati (2019) studi ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan Pemerintah daerah terus bergantung pada uang yang disediakan oleh pemerintah federal/pusat karena mereka belum dapat memanfaatkan sumber kekayaan lokal mereka sendiri.

Uji t kedua dilakukan pada variabel belanja modal. Ini menguji H2, yang menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh belanja modal. Nilai sig untuk belanja modal adalah 0,618; dengan kata lain, pengujian menyimpulkan bahwa $\text{sig} > 0,05$. Akibatnya hipotesis ini ditolak dan hasil penelitian ini sejalan dengan Prastiwi & Aji (2020) dan Febrianto & Trisnawati (2018) temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan tidak signifikan. Artinya, ketidaksignifikasian belanja modal dianggap pemborosan yang bisa berujung pada penyelewengan dana ketika pemerintah daerah secara tidak tepat mengarahkan belanja modal yang tidak bermanfaat bagi daerah. Pada fokusnya, belanja modal ini hanya berguna jika membantu mengembangkan daerah yang membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga sulit merepresentasikan kinerja keuangan Pemerintah di daerah, tidak ada keuntungan dan tidak ada pengaruhnya bagi daerah. Sejalan dengan teori keagenan bahwa pengelolaan aset-aset yang ada, termasuk penggunaan belanja modal yang dianggarkan yang dapat berupa sarana dan prasarana unggulan bagi masyarakat sehingga dapat dirasakan pemerintah daerah perlu mengelola aset-aset tersebut berisiko karena dana yang diperoleh dari manajemen. Agen (pemerintah) yang didelegasikan untuk belanja modal harus bertanggung jawab dan menangani tugas pemeliharaan aset tetap. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan temuan Anggraeni (2020) dan Digdowiseiso et al. (2021). Sumber-sumber tersebut menyatakan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangannya dikarenakan pemerintah daerah diklaim dapat ditingkatkan dengan penanaman modal. Oleh karena itu, jika pelaksanaan belanja modal dilakukan secara efektif, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, yang memungkinkan terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

Uji t ketiga mengevaluasi Hipotesis H3 yang menyatakan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai sig untuk variabel dana perimbangan adalah 0,000 ini menunjukkan bahwa signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan temuan Prastiwi & Aji (2020) dan Andaresta & Aswar (2021). Para peneliti tersebut menyatakan bahwa pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan berasal dari dana perimbangan. Ini berarti bahwa ketika lebih banyak dana datang dari pusat, pemerintah daerah menunjukkan situasi keuangan yang kurang baik bagi pemerintah daerah kemandirian terbatas karena daerah tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya ini. Hal ini mendukung teori keagenan, yang berkaitan dengan dana perimbangan. Meskipun uang dari dana perimbangan dapat berguna untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik, seringkali tidak. Jumlah uang yang diterima

setiap daerah kecil dan tidak secara signifikan meningkatkan posisi keuangan mereka. Ditambah agen atau pemerintah daerah sangat bergantung pada pusat untuk mendapatkan dukungan keuangan. Akibatnya, mentransfer uang dari pusat akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nauw & Riharjo (2021) dan Febrianto & Trisnawati (2018) mengklaim bahwa hasil studi mereka bertentangan dengan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah dikarenakan mayoritas uang yang dikirim oleh pemerintah federal/pusat masih digunakan untuk pengeluaran pegawai. Akibatnya, ada lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk layanan publik, memastikan bahwa kuantitas pendapatan antar pemerintah tidak berpengaruh pada keberhasilan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Suatu penelitian variabel terikat dapat diuji secara simultan dengan variabel bebas dengan menggunakan uji F (Ghozali 2018). Dalam penelitian ini, *error margin* menggunakan taraf signifikan 0,05.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3128,513	3	1042,838	24,772	,000 ^b
Residual	1305,035	31	42,098		
Total	4433,548	34			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 25 (2022)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji F simultan. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig yang menunjukkan signifikansi statistik harus kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah. Pernyataan Digdownise et al. (2021) terbukti benar oleh penelitian ini. Nilai F-Tabel untuk penelitian ini adalah 24.772 ini lebih besar dari 2,87 yang membuktikan adanya pengaruh Pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nauw & Riharjo (2021) juga mengklaim pada tahun 2021 Pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,840 ^a	,706	,677	6,48829	1,156
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2022)

Tabel 4 menunjukkan bahwa 67,7% variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini dilihat dari nilai Adjusted R Square. Selain itu, $100\% - 67,7\% = 32,3\%$ sisa variabel kinerja keuangan tidak diselidiki dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertama, pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, belanja modal tidak memiliki hubungan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga, dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Keempat, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki hubungan secara simultan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak menggunakan data primer. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka waktu *cross section* yang mencakup hanya beberapa tahun untuk menunjukkan keadaan yang ada pada saat penelitian.

Saran yang ditunjukkan peneliti masa depan harus menggunakan lebih banyak data dalam studi empiris. Selain itu, harus mempertimbangkan untuk menambahkan variabel baru kedalam penelitian seperti variabel pertumbuhan ekonomi, dana keistimewaan ataupun ukuran pemerintah daerah. Para peneliti yang disarankan ini sebaiknya menggunakan hasil penelitian ini sebagai standar untuk menilai kinerja keuangan Karesidenan Pekalongan. Juga harus memberikan wawasan dan saran bagi program-program masyarakat khususnya yang terkait dengan kesejahteraan dalam rangka mendukung aspek keuangan program pemerintah di masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1614–1624.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250.
- Anggraeni, D. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Jawa Timur. 1–20.
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020). *EProceedings of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Dewata, E., Sari, Y., & Nuvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 287–295.
- Diktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran*. Diakses pada 6 Juni 2022 dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Febrianto, N., & Trisnawati, R. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi DIY Tahun 2009-2016). 1–15.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Izzati, N., Ernitawati, Y., & Pangestu, D. (2021). Kinerja Keuangan Perusahaan Terindeks LQ45: Kepemilikan Institutional dan Aktivitas Komite Audit. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 2(1), 67–83.
- Khasanah, N. R., Ernitawati, Y., & Susanti, S. (2021). Komite Audit dan Kepemilikan Institutional: Kinerja Keuangan Perusahaan Terindeks LQ45. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2(1), 28–44.
- Maftuhin, Ernitawati, Y., & Wulandari, H. K. (2021). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan Hotel (Studi Pada Karyawan Hotel Dedy Jaya Group). *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2(1), 1–6.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Nugraha, A. C., & Trisnawati, R. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015—2017). 1–18.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Saputri, S. H., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Sari, N., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759–4787.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Sutrisno, W. H., & Sugiyanto, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017). 1–11.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.